

TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh : Yudi Rachman

Awal tahun 2020, beberapa daerah, khususnya Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mendapatkan kado istimewa dari alam berupa limpahan curahan hujan dengan durasi berhari-hari. Curah hujan yang selama ini ditunggu-tunggu untuk menurunkan suhu yang sudah berbulan-bulan meninggi ternyata dianggap menjadi penyebab banjir di mana-mana.

Ada sekitar 169 titik wilayah di Jabodetabek yang terkena banjir. Titik banjir terbanyak menimpa Jawa Barat sebanyak 97 titik (Kabupaten Bekasi 32, Kota Bekasi 53 titik, dan Kabupaten Bogor 12 titik) dan DKI Jakarta 63 titik.

Peristiwa yang sudah rutin terjadi, semestinya kembali menyadarkan, bahwa ada aspek pembangunan yang selama ini diabaikan. Pembangunan hanya diarahkan atau selalu memprioritaskan kepada aspek yang berorientasi dan berpotensi mendatangkan keuntungan (profit) saja dan menyisihkan bahkan tidak peduli dengan faktor lingkungan (planet) dan sosial (people).

Salah satu buktinya, acapkali muncul tudingan terhadap alam mengenai beragam bencana yang terjadi di muka bumi. Ketika suhu bumi meningkat dan menjadi penyebab mencairnya es di kutub utara juga selatan sehingga menaikkan air laut. Alam dianggap sudah berubah dan tidak bersahabat lagi. Begitu juga dengan peristiwa lain, seperti banjir kali ini. Masih terdengar analisis yang terkesan menyudutkan alam. Pada sisi lain, sudah banyak pula yang menyadari, bahwa peristiwa alam yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia dalam memperlakukan lingkungannya.

Ketika peristiwa banjir terjadi, salah satu yang menjadi topik hangat diskusi seringkali seputar saluran air dan tempat penampungan air sementara. Karena persoalan banjir selalu berkutat pada dua hal itu. Sementara debit air, bila mengacu kepada hukum kekekalan massa yang digagas 2 ilmuwan Antoine Lavoisier dan Mikhail Lomonosov, massa zat dalam suatu sistem tertutup selalu konstan, meski terjadi berbagai macam proses di dalamnya, tidak pernah berubah. Jadi debit air di bumi tidak pernah berubah. Hanya intensitasnya saja yang berbeda-beda. Dengan demikian, tingginya curah hujan seharusnya tidak akan menjadi persoalan bila

Ukuran keberhasilan pembangunan bersifat tunggal. Dan semua ukuran diarahkan kepada sisi ekonomi (profit). Sementara aspek lain tidak menjadi ukuran sehingga selalu diabaikan. Salah satunya aspek lingkungan. Karena semua diarahkan untuk meraih keuntungan profit, standar turunannya pun sama. Seperti penerapan tata kelola (governance).



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

kondisi sosial dan lingkungan disiapkan untuk menghadapinya. Berarti bila banjir masih terjadi, ada aspek lingkungan yang diabaikan. Bisa yang berhubungan dengan saluran dan penampungan air hujan yang bermasalah atau perilaku manusia dalam memperlakukannya. Sebenarnya, kedua hal tersebut sudah lama disadari oleh para pengambil kebijakan.

Bila melihat konsep pembangunan, maka wajar bila musibah yang bersumber dari perilaku alam masih terus bermunculan. Harus diakui selama ini telah terjadi ketimpangan. Ukuran keberhasilan pembangunan bersifat tunggal. Dan semua ukuran diarahkan kepada sisi ekonomi (profit). Sementara aspek lain tidak menjadi ukuran sehingga selalu diabaikan. Salah satunya aspek lingkungan. Karena semua diarahkan untuk meraih keuntungan profit, standar turunannya pun sama. Seperti penerapan tata kelola (governance).

Selama ini tata kelola seringkali disematkan dengan hubungan antara pemilik dan pengelola (teori keagenan). Menurut Xu dan Wang (1997), tata kelola merupakan alat yang berfungsi untuk meminimalisir (memoderasi) terjadinya permasalahan keagenan (agency problem) yang menjadi penyebab munculnya biaya keagenan (agency cost). Masalah keagenan timbul terkait hubungan antara pemilik dan pengelola untuk mencapai tujuan yakni mencetak keuntungan sebesar-besarnya.

Sementara tidak satu pun entitas, baik perusahaan maupun pemerintahan, yang hidup di ruang hampa. Pasti membutuhkan lingkungan dan bersentuhan dengan masyarakat sekitarnya secara langsung atau pun tidak langsung. Berarti, sebenarnya ada aktor lain yang terlibat, tidak hanya pemilik (principal) dan agen (pengelola) tapi ada aktor ketiga yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Sayangnya selama ini selalu luput dari perhatian, bahkan diabaikan. Keberadaannya lebih sering menjadi pelengkap penderita. Aktor ketiga ini sering disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Tata Kelola Berkelanjutan

Prinsip 3 P (Profit, Planet, dan People) atau triple bottom line merupakan konsep yang digagas Elkington (1998). Lahir dari keprihatinan terhadap paradigma lama yang hanya fokus pada pencapaian ekonomi (profit). Ekonomi menjadi pengendali, sementara bidang lain harus mengekor atau harus dalam kendali ekonomi. Dengan paradigma tersebut, kini semua menyaksikan kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana. Tidak hanya di darat, tapi juga di laut dan di udara. Sementara kita menyadari hingga kini bahwa bumi masih menjadi satu-satunya tempat tinggal yang layak bagi manusia. Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka dikembangkanlah paradigma baru. Keberhasilan pembangunan tidak lagi dilihat hanya dari sisi ekonomi, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Untuk mewujudkan tata kelola berkelanjutan, sebenarnya tidak berbeda dengan tata kelola yang berlaku selama ini. Secara prinsip tidak ada yang berbeda, masih mengacu kepada prinsip



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights), yakni transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (responsiveness) atau sering disingkat dalam akronim TARIF.

Yang membedakan adalah cakupannya saja. Tata kelola keberlanjutan, cakupannya mengacu kepada 3P atau triple bottom line. Selain itu, insititusi manapun yang ingin menerapkannya harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders). Tiap institusi memiliki pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

Mengapa perlu melibatkan pemangku kepentinga ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Kita harus mengetahui yang dimaksud dengan pemangku kepentingan. Menurut Freeman (1984), pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Institusi bertanggung jawab dalam memenuhi seluruh kepuasan pemangku kepentingan. Jadi, pemangku kepentingan itu bisa yang terlibat langsung dengan institusi, seperti karyawan atau pemegang saham bila mengacu kepada perusahaan. Tapi ada juga yang bukan menjadi bagian langsung, seperti masyarakat yang berada pada lingkungan dimana institusi berada.

Dengan demikian, bila musibah yang bersumber dari alam kembali terjadi, diharapkan sudah tidak lagi mempersalahkan alam melainkan mempertanyakan bagaimana tata kelola berkelanjutan dijalankan.

(Tulisan ini telah dimuat dalam Majalah Stabilitas Edisi ke-162)

Tentang Penulis :



Yudi Rachman lahir di Pandeglang, 8 April 1979. Lulusan S1 Universitas Padjajaran dan S2 Universitas Indonesia ini aktif sebagai Fakultas dan Researcher di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia sampai dengan saat ini. Beliau juga merupakan penulis aktif untuk Majalah Stabilitas Jasa Keuangan.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

